

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kesejahteraan Sosial

Megenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, ditemukan bahwa kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai cabang ilmu sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup individu atau kelompok. Definisi kesejahteraan sosial menurut (Suharto, 2005) sebagai berikut :

Kesejahteraan Sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kesejahteraan sosial, baik pada tingkat individu maupun kelompok, diperlukan untuk memastikan fungsi yang optimal bagi individu dan kelompok tersebut terpenuhi. Tujuan Kesejahteraan Sosial menurut (Fahrudin, 2014) mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Menurut Schneiderman (1972) dalam (Fahrudin, 2014) terdapat tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Sistem Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau

kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang bertalian dengan definisi, makna, dan tujuan hidup. Kegiatan sistem kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan meliputi kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi anggota terhadap norma-norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk mempergunakan sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalui pemberian informasi, nasihat dan bimbingan.

2. Pengawasan Sistem Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi; mengintensifkan fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku. Hal ini dimaksudkan agar dapat ditingkatkan pengawasan dirisendiri (self- control) dengan jalan mengilangkan sebab-sebab masalah yang sesungguhnya.
3. Perubahan Sistem Mengadakan perubahan kearah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat. Dalam mengadakan perubahan itu, sistem kesejahteraan sosial merupakan instrument untuk menyingkahkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, pembagian sumber- sumber secara lebih pantas dan adil, dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia.
- 4.

2.1.1 Fungsi-Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi-fungsi sosial memiliki tujuan untuk mengurangi tekanan yang timbul akibat perubahan sosio-ekonomi, mencegah dampak negatif dari pembangunan, dan menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Friedlander & Apte (1982) dalam (Fahrudin, 2014) menyebutkan fungsi-fungsi kesejahteraan sosial yaitu:

1) Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

2) Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk mengilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

3) Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4) Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

2.2 Pekerjaan sosial

Pekerja sosial merupakan suatu profesi dalam ranah ilmu kesejahteraan sosial yang memberikan layanan sosial kepada individu atau kelompok dengan tujuan membantu memulihkan fungsi sosial individu atau kelompok tersebut. Pengertian pekerjaan sosial menurut Zastrow, 1999 (dalam Suharto 2020:125) Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut. Dapat disimpulkan dari penjelasan tersebut bahwa pekerjaan sosial

memiliki peran penting bagi individu atau kelompok yang mengalami masalah dan memerlukan bantuan untuk mengembalikan fungsi sosial mereka.

2.2.1 Tujuan Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial memiliki peran penting dalam memberikan bantuan kepada individu, kelompok, dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka serta meningkatkan kualitas hidup, dengan tujuan mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Tujuan praktis pekerjaan sosial menurut NASW dalam (Fahrudin, 2014), yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (coping), perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber yang memberikan kesempatan-kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber pelayanan-pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas, pekerjaan sosial memiliki empat tujuan, yaitu meningkatkan kemampuan individu dalam memecahkan masalah, mempermudah akses terhadap sumber daya yang memberikan peluang, meningkatkan efektivitas atau fungsionalitas sosial, serta mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial. Dengan demikian, melalui keempat tujuan praktis tersebut, pekerjaan sosial dapat memfasilitasi akses terhadap berbagai layanan yang ada untuk mencapai tingkat kesejahteraan. Selain tujuan tersebut, Zastrow (2008) dalam (Fahrudin, 2014) menambahkan empat tujuan yang dikemukakan oleh CSWE, yaitu

sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya
2. Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
3. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.
4. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

Pekerjaan sosial menurut CSWE memiliki empat tujuan utama, yaitu meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh dengan memulihkan fungsi sosial. Melalui memberikan akses terhadap layanan kepada individu, kelompok, dan masyarakat, pekerjaan sosial dapat membantu mereka dalam mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Praktik pekerjaan sosial ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan dan strategi yang telah dipahami oleh para pekerja sosial tersebut.

2.2.2 Prinsip Dasar Praktik Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial sebagai proses yang tentunya profesional, dalam ketentuannya memiliki prinsip-prinsip yang menaungi dan mengiringi dalam kelangsungannya. Menurut Mans dikutip Fahrudin (1994:16-19), ada enam prinsip dasar dalam praktek pekerjaan sosial yaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan Prinsip ini mengemukakan tentang pekerja sosial yang menerima klien tanpa "menghakimi" klien tersebut sebelum, pekerja sosial untuk menerima klien dengan sewajarnya (apa adanya) akan lebih membantu pengembangan relasi antara pekerja sosial dengan kliennya.
2. Komunikasi Prinsip komunikasi ini dengan mudah dapat mendukung. Untuk komunikasi dengan klien, baik dalam bentuk komunikasi yang

verbal, yang meminta klien melalui sistem klien, maupun bentuk komunikasi nonverbal, seperti cara membuka klien, memilih cara duduk, duduk dalam suatu pertemuan dengan anggota keluarga yang lain.

3. Individualisasi Prinsip individualisasi pada intinya mempertimbangkan setiap individu yang berbeda satu sama lain, sehingga seorang pekerja sosial haruslah mengatur cara memberi kliennya, guna mendapatkan hasil yang diinginkan.
4. Partisipasi Berdasarkan prinsip ini, seorang pekerja sosial harus meminta kliennya untuk mendorong aktif dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapinya, sehingga klien dapat menggunakan sistem klien yang juga menyediakan rasa bantuan untuk bantuan tersebut. Karena tanpa ada kerja sama dan peran serta klien maka upaya bantuan sulit untuk mendapatkan hasil yang optimal.
5. Kerahasiaan Prinsip kerahasiaan ini akan memungkinkan klien atau sistem klien mengungkapkan apa yang sedang ia rasakan dan bahaya ia hadapi dengan rasa aman, karena ia yakin apa yang ia utarakan dalam hubungan kerja dengan pekerja sosial akan tetap dijaga (dirahasiakan) oleh pekerja sosial agar tidak diketahui oleh orang lain (mereka yang tidak berkepentingan).
6. Kesadaran diri pekerja sosial. Prinsip kesadaran diri ini menuntut pekerja sosial untuk menjalin relasi profesional dengan menjalin relasi dengan kliennya, dalam arti pekerja sosial yang mampu menggerakkan benar-benar terhanyut oleh perasaan atau bantuan yang disampaikan oleh kliennya tidak "kaku" dalam percakapan dengan pekerja sosial, yang pesan informasi atau cara bicara, cara berbicara, dan lain-lain, bantuan dengan setiap tanggung jawab terhadap keberhasilan proses.

Enam prinsip dasar pekerjaan sosial yang telah dijelaskan di atas berperan dalam memberikan pengakuan kepada klien yang sedang mendapat layanan dari pekerja sosial. Prinsip-prinsip tersebut juga bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama, seperti hak individu untuk menentukan jalannya sendiri dalam kehidupan, dengan tujuan agar mereka dapat berfungsi secara sosial.

2.3 Masalah Sosial

Masalah sosial terjadi ketika keadaan tidak sejalan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, atau ketika ada ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Adapun pengertian masalah sosial menurut Harton dan Leslie (Suharto, 1997) (dalam Suharto, 2020:80) Masalah sosial sebagai suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif.

Dapat ditarik kesimpulan dari definisi tersebut bahwa masalah sosial adalah kesulitan yang muncul dan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Permasalahan ini muncul karena tidak sesuainya dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Seiring dengan munculnya permasalahan di dalam masyarakat, diperlukan tindakan dan penanganan untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah tersebut.

2.4 Keberfungsian Sosial

Keberfungsian sosial mencakup kondisi di mana baik individu maupun kelompok mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya serta mengatasi masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain, individu atau kelompok dapat melaksanakan fungsinya dalam konteks sosial dengan baik. Adapun keberfungsian sosial menurut Boehm (dalam Fahrudin, 2018:10) Keberfungsian sosial merupakan terma teknis yang mendukung fokus profesi pekerjaan sosial pada transaksi-transaksi manusia dalam lingkungannya.

Ditarik kesimpulan bahwa keberfungsian sosial merupakan aspek yang terkait dengan profesionalisme pekerjaan sosial. Hal ini karena pekerjaan sosial sebagai profesi memberikan bantuan dalam memulihkan keberfungsian individu atau kelompok yang mengalami masalah. Maka dari itu sangatlah penting bagi kehidupan tiap individu atau kelompok dalam terpenuhinya keberfungsian sosial. Pentingnya konsep keberfungsian sosial ini dipertegas oleh Morales dan Sheafor (1999) dengan mengatakan bahwa keberfungsian sosial merupakan sebuah konsep pembeda antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi lainnya.

2.4.1 Karakteristik Keberfungsian Sosial

Keberfungsian sosial mengindikasikan kapasitas seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, melaksanakan peran dalam konteks sosial, dan menghadapi tantangan yang muncul. Namun, terkadang aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dapat mengalami kendala, menghasilkan hasil yang tidak memuaskan, sehingga individu tersebut dianggap tidak mampu menjalankan fungsinya dalam konteks sosial. (Siporin 1975) menyatakan bahwa keberfungsian sosial merupakan suatu cara yang menggambarkan perilaku orang. Konsep keberfungsian sosial mencakup empat tingkatan, yakni tingkatan individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat maka karakteristik keberfungsian sosialnya akan berkisar pada masalah:

- a. Kemampuan dalam melaksanakan peranan sosial dalam kehidupan.

b. Kemampuan menjalin relasi positif dengan orang lain.

c. Kemampuan dalam menghargai diri sendiri.

Kondisi seperti ini dapat dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan karakteristik keberfungsian sosial diatas bahwasannya melaksanakan tugas–tugas kehidupan individu atau selektif untuk memenuhi kebutuhan–kebutuhan mereka dan memberikan kesejateraan kepada individu atau komunitas.

2.5 Disabilitas

Disabilitas merujuk pada individu yang mengalami keterbatasan, baik itu dalam hal fisik, mental, atau intelektual. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, disabilitas didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang panjang sehingga saat berinteraksi dengan lingkungan, mereka menghadapi hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif bersama warga negara lainnya, dengan prinsip kesetaraan hak. Adapun pengertian disabilitas menurut Sholeh (2016:22) menyatakan bahwa :

Disabilitas (disability) atau cacat adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental intelektual, atau sensorik, dalam jangka waktu lama di mana kita berhadapan dengan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Dapat ditarik kesimpulan dari definisi di atas bahwa disabilitas merujuk pada individu yang mengalami keterbatasan, baik itu dalam aspek

fisik, mental, atau intelektual, sehingga keberfungsian sosialnya terhambat.

2.6 Disabilitas Tunarungu

Disabilitas tunarungu merupakan kategori disabilitas fisik di mana terdapat kekurangan atau ketidakberfungsian pada indra pendengaran individu. Ketidakmampuan pendengaran ini bisa bersumber dari kondisi bawaan sejak lahir atau akibat dari suatu kecelakaan. Adapun definisi disabilitas rungu menurut Salim (dalam Somantri, 2006:93) Disabilitas rungu adalah seorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kekurangan atau tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran sehingga ia mengalami hambatan perkembangan bahasanya.

Dapat ditarik kesimpulan dari definisi di atas bahwa disabilitas tunarungu adalah kondisi kehilangan indra pendengaran, baik itu dari lahir maupun sebagai akibat dari suatu kecelakaan. Tantangan-tantangan yang sering muncul pada individu dengan disabilitas tunarungu mencakup kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain, keterbatasan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dan kesulitan dalam memahami bahasa saat berkomunikasi dengan rekan bicara.

2.6.1 Karakteristik Anak Tunarungu

Anak tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran atau kehilangan pendengaran sejak lahir atau sejak usia dini. Penting untuk diingat bahwa setiap anak tunarungu adalah individu yang

unik, dan karakteristik mereka dapat bervariasi. Pendekatan pendidikan dan dukungan yang dipilih harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing anak. adapun karakteristik menurut Beberapa karakteristik secara umum yang sering ditemukan pada anak tunarungu (Somantri. 2012 : 97–99), diantaranya:

1. Dalam segi fisik: cara berjalannya kaku dan agak membungkuk, gerakan matanya cepat, agak beringas, gerakan kaki dan tangannya sangat cepat/lincah, pernafasannya pendek dan agak terganggu;
2. Dalam segi inteligensi: anak-anak tunarungu sukar dapat menangkap pengertian yang abstrak, sebab untuk dapat menangkap pengertian abstrak diperlukan pemahaman yang baik akan bahasa lisan maupun bahasa tulisan;
3. Dalam segi emosi: emosi anak tunarungu selalu bergolak, di satu pihak karena kemiskinan bahasanya, dan di lain pihak karena pengaruh-pengaruh dari luar yang diterimanya;
4. Dalam segi sosial: perasaan rendah diri, perasaan cemburu, dan kurang dapat bergaul;
5. Dalam segi bahasa: miskin dalam kosa kata, sulit mengartikan ungkapan-ungkapan bahasa yang mengandung arti kiasan, sulit mengartikan kata-kata abstrak, kurang menguasai irama dan gaya bahasa.

pendapat diatas dapat disimpulkan Secara keseluruhan, karakteristik anak tunarungu yang diuraikan menunjukkan bahwa mereka menghadapi sejumlah tantangan dalam aspek fisik, kecerdasan, emosional, sosial, dan bahasa. Fisik mereka mungkin tercermin dalam gerakan tubuh yang kaku dan pernafasan yang terganggu. Dari segi kecerdasan, kesulitan menangkap konsep abstrak menjadi tantangan, seiring dengan keterbatasan dalam pemahaman bahasa. Aspek emosional anak tunarungu ditandai dengan perasaan yang cenderung bergolak, sebagian disebabkan oleh kendala bahasa dan pengaruh luar.

2.6.2 Klasifikasi Anak Tunarungu

Klasifikasi anak tunarungu mengacu pada proses pengelompokan atau penentuan kategori anak-anak yang menghadapi masalah pendengaran. Proses klasifikasi ini dapat melibatkan penilaian berdasarkan berbagai faktor, seperti sejauh mana tingkat kehilangan pendengaran, penyebab dari gangguan pendengaran, atau karakteristik tambahan yang mungkin dimiliki oleh anak tunarungu tersebut. Jika ditinjau dari taraf ketunarunguan (Somantri, 2012: 95), ada 4 kelompok kategori tunarungu, diantaranya:

1. Taraf I : kehilangan kemampuan mendengar antara 35 sampai 54 dB, penderita hanya memerlukan latihan berbicara dan bantuan mendengar secara khusus
2. Taraf II: kehilangan kemampuan mendengar antara 55 sampai 69 dB, penderita kadang-kadang memerlukan penempatan sekolah secara khusus, dalam kebiasaan sehari-hari memerlukan latihan berbicara dan bantuan latihan berbicara secara khusus
3. Tingkat III: kehilangan kemampuan mendengar antara 70 sampai 89 dB
4. Tingkat IV: kehilangan kemampuan mendengar 90 dB ke atas

Dari kesimpulan poin diatas Pengklasifikasian ini memberikan pandangan tentang tingkat keparahan ketunarunguan dan kebutuhan perawatan yang sesuai untuk masing-masing kelompok anak tunarungu.

2.7 Implementasi

Implementasi merujuk pada proses atau tindakan menerapkan suatu konsep, rencana, atau ide menjadi kenyataan atau melaksanakan sesuatu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. ada juga yang menemukan (Majone&Wildavsky 2004) yang dikutip dari (Nurdin&Usman 2004), mengemukakan implementasi menjadi penilaian. Mengemukakan mengenai

yang sama bahwa implementasi ialah ekspansi aktivitas yang saling menyesuaikan atau bisa dikatakan implementasi menjadi kativitas yang saling menyesuaikan.

Kesimpulan di atas menjelaskan bahwa implementasi adalah langkah- langkah atau tindakan yang direncanakan untuk melaksanakan program yang telah disusun, serta memahami konsekuensi sebenarnya yang terjadi setelah program tersebut diterapkan secara resmi.

Secara keseluruhan, pengertian program merujuk pada eksekusi dari suatu perencanaan. Dalam konteks ini, program dianggap sebagai bagian integral dari perencanaan dan sering kali dijelaskan sebagai kerangka dasar pelaksanaan suatu kegiatan. adapun pengertian implemtasi program menurut (Jones, 1996) dikutip oleh (Auldrin 2016) yaitu:

Implementation is the seft of activities directed toward putting a program into effect (impelementasi adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu).

Definisi di atas tersebut menjelaskan bahwa implementasi program adalah suatu inisiatif yang ditujukan untuk memahami hasil sebenarnya yang terjadisetelah pelaksanaan suatu program dan menilai dampak aktual yang dihasilkan dari pelaksanaan program tersebut.

2.8 Pelatihan

Pelatihan adalah bagian dari program pendidikan yang tidak terjadi di dalam lingkungan sekolah dan umumnya berlangsung dalam periode waktu yang relatif singkat. Fungsinya adalah memberikan keterampilan khusus

atau pengetahuan tertentu kepada peserta. Adapun pengertian pelatihan menurut (Goldstsein&Gressner dikutip Kamil 2010) sebagai berikut:

Pelatihan adalah suatu usaha yang sistematis untuk menguasai keterampilan, peraturan, konsep, ataupun cara berperilaku yang berdampak pada peningkatan kinerja.

Dengan merujuk pada konsep di atas, pelatihan memiliki tujuan utama untuk memperluas keterampilan peserta. Jenis-jenis pelatihan bervariasi, termasuk pelatihan vokasional yang dianggap sesuai untuk diberikan kepada individu dengan kebutuhan khusus, termasuk mereka yang memiliki disabilitas tunarungu.

2.9 Vokasional

Vokasional merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan ketrampilan dan pengetahuan praktis yang spesifik terkait dengan suatu pekerjaan atau profesi tertentu. Pelatihan vokasional biasanya didesain untuk mempersiapkan seseorang agar memiliki keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk sukses dalam pekerjaan atau karier tertentu. Program vokasional dapat mencakup pendidikan teknis, pelatihan keterampilan praktis, atau pembelajaran yang terfokus pada keahlian dan pengetahuan yang dapat diterapkan langsung dalam dunia kerja.ada juga definisi vokasional menurut (sudira, 2017:05)

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa vokasional adalah vokasional mengacu pada aspek-aspek yang terkait dengan ketrampilan dan pengetahuan praktis yang bersifat spesifik terhadap suatu pekerjaan atau profesi tertentu. Pelatihan vokasional dirancang dengan tujuan

mempersiapkan individu agar memperoleh keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam suatu pekerjaan.

2.9.1 Pelatihan Vokasional

Pelatihan vokasional adalah program atau kegiatan belajar yang khusus dirancang untuk memberikan keterampilan praktis, pengetahuan, dan persiapan kerja kepada peserta pelatihan. Fokus utama dari pelatihan ini adalah menyiapkan individu agar dapat memasuki dunia kerja dengan keterampilan yang relevan dan dapat diterapkan secara langsung dalam suatu pekerjaan atau profesi tertentu. Pelatihan vokasional biasanya terkait erat dengan kebutuhan industri atau sektor pekerjaan tertentu, dan tujuannya adalah meningkatkan kemampuan peserta pelatihan agar dapat sukses dan produktif di lingkungan kerja yang sesungguhnya. Tempat penyelenggaraan pelatihan vokasional dapat bervariasi, melibatkan lembaga-lembaga seperti sekolah menengah kejuruan, pusat pelatihan, dan institusi pendidikan atau pelatihan lainnya. Adapun pengertian menurut (Yoshimitsu 2003) yaitu:

Pelatihan vokasional merupakan salah satu dari rangkaian program rehabilitasi vokasional, merupakan upaya agar penyandang disabilitas memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk suatu jenis pekerjaan, sehingga dapat mempertahankan pekerjaan tersebut maupun meningkatkan kedudukannya.”

Berdasarkan definisi di atas tentang pelatihan vokasional, dalam konteks penelitian ini, pelatihan vokasional mengacu pada proses pembelajaran yang terfokus pada suatu bidang pekerjaan spesifik. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan khusus atau mencapai kompetensi yang diperlukan untuk suatu

jenis pekerjaan tertentu. Komponen- komponen pelatihan vokasional yang relevan dalam penelitian ini mencakup peserta pelatihan yang merupakan penyandang disabilitas, kinerja instruktur pelatihan, kurikulum pelatihan, dan profil penyelenggara pelatihan.

2.9.2 Konsep Pelatihan Vokasional

Pelatihan vokasional merupakan pilihan pendidikan yang populer, terutama bagi anak Tunarungu, sebagai upaya untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini disebabkan oleh keunggulannya, seperti durasi pendidikan yang singkat, aksesibilitas yang baik, fokus pada kebutuhan dunia kerja, dan kesesuaian yang lebih baik dengan persyaratan perusahaan sebagai penyedia peluang pekerjaan. Selaras dengan pendapat (Billet, 2011) yang menyatakan bahwa pelatihan vokasional adalah suatu pendidikan yang mengembangkan kevakasian seseorang untuk mendapatkan kompetensi atau keahlian dalam melakukan atau melaksanakan pekerjaan.

Pelatihan vokasional dianggap cocok untuk diberikan kepada penyandang disabilitas termasuk penyandang Tunarungu. Pelatihan vokasional merupakan jenis pelatihan yang terfokus pada satu bidang keahlian tertentu, tujuannya untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan bagi peserta. Pelatihan vokasional ini dianggap mempunyai tingkat kesulitan yang rendah dan mempunyai nilai ekonomis sehingga akan cocok jika diberikan pada penyandang disabilitas atau Tunagrungu ini. Adapun pengertian menurut Goldstsein dan Gressner dikutip oleh Kamil (2010:6) yaitu:

Pelatihan adalah suatu usaha yang sistematis untuk menguasai keterampilan, peraturan, konsep, ataupun cara berperilaku yang berdampak pada peningkatan kinerja.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pelatihan vokasional sangat cocok untuk diberikan kepada penyandang tunarungu yang bertujuan untuk memberikan keterampilan dalam waktu relatif singkat serta bekal untuk keluar sekolah.

2.9.3 Tujuan Pelatihan Vokasional

Adapun keterampilan vokasional di ajarkan kepada anak tunarungu tentu saja tujuan utamanya adalah untuk memberi bekal kepada anak apabila telah lulus dari sekolah mereka mampu untuk hidup mandiri dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun tujuan dari keterampilan vokasional menurut (Iswari 2008) yaitu:

- a. Untuk meningkatkan kecakapan siswa berkebutuhan khusus dalam melakukan suatu pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki.
- b. Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam meraih dan menciptakan jenis pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan tidak terhalang oleh hambatan yang dimiliki.
- c.
- d. Untuk menanamkan sikap dan jiwa kewirausahaan yang tinggi untuk memasuki dunia kerja, baik menjadi pekerja ataupun sebagai wirausaha.
- e. Untuk meningkatkan kepercayaan dunia usaha dan industri agar mampu mempekerjakan mereka sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan yang layak seperti orang normal lainnya.
- f. Untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mampu mengembangkan kemampuannya dalam bekerja, terutama bagi anak tunarungu, tunanetra dan tunadaksa.

Mengacu pada seluruh poin yang telah disebutkan di atas, tujuan dari pelatihan vokasional adalah memberikan keterampilan kepada siswa

tunarungu agar mereka memiliki bekal yang cukup setelah menyelesaikan sekolah. Setidaknya, setelah lulus, mereka diharapkan memiliki setidaknya satu keahlian khusus, memungkinkan mereka untuk hidup mandiri tanpa harus bergantung pada orang lain.

2.10 Bimbingan

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan secara berkelanjutan kepada individu dengan tujuan agar mereka dapat memahami diri sendiri. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan individu tersebut mampu mengarahkan dirinya dan bertindak secara tepat sesuai dengan tuntutan dan kondisi lingkungan, baik di sekolah, keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan secara umum. berdasarkan (Natawidjaja 1987) dikutip oleh (Yusuf 2008) dengan demikian dia akan dapat menikmati kebahagiaan hidupnya, dan dapat memberi sumbangan yang berarti kepada kehidupan masyarakat pada umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah suatu proses yang terus-menerus, bukan sekadar kegiatan yang bersifat mendadak atau kebetulan. Bimbingan melibatkan serangkaian tahapan yang sistematis dan terencana, yang diarahkan secara terarah untuk mencapai tujuan tertentu.

2.11 Kemandirian

Kemandirian adalah kemampuan seseorang untuk mengatur diri sendiri, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas tindakan dan kehidupannya tanpa bergantung secara berlebihan pada bantuan atau arahan orang lain. Adapun pengertian menurut (Havighurst dikutip Anwar 2015) yaitu :

Kemandirian merupakan suatu sikap otonomi bahwa seseorang secara relatif bebas dari pengaruh penilaian, pendapat dan keyakinan orang lain.

Dari pernyataan di atas, dapat disarikan bahwa anak yang memiliki kemandirian dapat melakukan aktivitas sendiri tanpa terlalu bergantung pada orang lain. Hal ini menjadi relevan ketika berbicara tentang anak tunarungu yang mungkin menghadapi kendala dalam hal kecerdasan. Oleh karena itu, perencanaan kemandirian bagi anak-anak tunarungu harus mempertimbangkan potensi yang mereka miliki, sehingga kemandirian diukur berdasarkan kesesuaian antara kemampuan aktual dan potensi yang dimiliki oleh anak-anak tersebut.

2.11.1 Bentuk-bentuk Kemandirian

Kemandirian umumnya akan tercermin dalam kemampuan seseorang untuk menentukan nasibnya sendiri, bersifat kreatif dan inisiatif, serta mampu mengatasi pengaruh dari orang lain. Oleh karena itu, siswa yang merupakan penyandang disabilitas tunarungu membutuhkan bimbingan dan arahan agar dapat mandiri secara efektif. Dalam proses pendidikan, kerjasama antara sekolah dan orang tua sangat penting untuk mendidik siswa

tunarungu agar dapat tumbuh dewasa tanpa ketergantungan pada orang lain.

Havighurst dikutip oleh (Desmita 2014) mengatakan bentuk bentuk mandiri sebagai berikut :

1. Kemandirian Emosi yaitu kemampuan mengontrol emosi sendiri dan tidak tergantung kebutuhan emosi pada orang lain.
2. Kemandirian Ekonomi yaitu kemampuan mengatur ekonomi sendiri dan tidak tergantung kebutuhan ekonomi kepada orang lain.
3. Kemandirian Intelektual yaitu kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi
4. Kemandirian Sosial yaitu kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung pada aksi orang lain.

Berdasarkan poin-poin tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemandirian memiliki empat aspek utama, yaitu kemandirian emosi, ekonomi, intelektual, dan sosial. Dalam konteks pembelajaran di sekolah luar biasa, siswa tunarungu diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. Meskipun demikian, seringkali terdapat kesulitan dalam proses pembelajaran yang membuat siswa tunarungu mengalami kesulitan untuk mencapai tingkat kemandirian yang diinginkan.

2.11.2 Karakteristik Kemandirian

Ciri kemandirian pada seseorang mencerminkan kecenderungan dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah daripada terus menerus khawatir saat menghadapi tantangan. Individu yang mandiri tidak merasa takut untuk mengambil risiko karena mereka sudah mempertimbangkan konsekuensi sebelum bertindak. Adapun pengertian menurut (Covey,1997) mengemukakan kemandirian memiliki karakteristik yaitu :

1. Secara fisik mampu bekerja sendiri.
2. Secara mental mampu berfikir sendiri.
3. Secara kreatif mampu mengekspresikan gagasannya dengan cara yang mudah dipahami.
4. Secara emosional mampu bertanggung jawab sendiri dengan kegiatan yang dilakukannya.

Dengan merujuk pada uraian di atas yang menguraikan berbagai sifat kemandirian, dapat dipahami bahwa kemandirian seseorang dalam bertanggung jawab terhadap dirinya memiliki ciri-ciri yang beragam. Dalam konteks ini, kita dapat memeriksa karakteristik kemandirian anak Tunarungu yang memungkinkan mereka untuk tidak bergantung pada orang lain.

2.11.3 Faktor–faktor yang Mempengaruhi Kemandirian

Dalam mencapai kemandirian siswa tunarungu, seringkali muncul permasalahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memengaruhi perkembangan kepribadian mereka. Terdapat faktor-faktor yang menjadi dasar dalam pembentukan kemandirian, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, upaya mencapai kemandirian seseorang sangat ditentukan oleh sejauh mana faktor-faktor tersebut memainkan peran dalam perkembangan kemandirian siswa tunarungu. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi kemandirian menurut (Ali 2010) yaitu:

1. Faktor Internal Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam orang itu sendiri atau pengaruh dari keadaan gen atau keturunan orangtua yaitu orangtua yang memiliki kemandirian, dan konstitusi tubuh sejak dilahirkan dengan segala perlengkapan yang melekat padanya, kematangan usia dan jenis kelamin.
2. Faktor Eksternal Faktor eksternal adalah segala hal yang diterima individu dari lingkungan lingkungannya diantaranya:
 - a. Pola asuh orangtua

- b. Sistem pendidikan
- c. Sistem kehidupan masyarakat

Berdasarkan definisi di atas, terlihat bahwa kemandirian dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Dalam kaitannya dengan hal ini, beberapa faktor seperti pendidikan, pola asuh orangtua, dan kondisi kehidupan masyarakat menjadi unsur-unsur yang berperan. Oleh karena itu, kemandirian anak dapat terganggu oleh berbagai faktor yang memiliki dampak pada perkembangannya.